

PELAKSANAAN PENGAWASAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BAGI TENAGA MEDIS DI PUSKESMAS KOTA PALEMBANG

INTISARI

Oleh:

Elisa Diana Oktarini¹, Rimawati²

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan dan pengawasan terhadap sistem keselamatan dan kesehatan kerja bagi tenaga medis di Puskesmas, serta perlu atau tidaknya pembentukan peraturan perundangundangan baru sebagai dasar hukum dalam pengaturan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja di Puskesmas.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris yang menggunakan data sekunder dan data primer melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Lokasi penelitian lapangan berada di Kota Palembang, melingkupi Puskesmas dengan akreditasi Paripurna, yaitu Puskesmas Plaju; Puskesmas Dempo; dan Puskesmas Alang-alang Lebar . Data primer diperoleh dari subjek penelitian, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi dokumen, penelitian ini dianalisis dengan metode kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif belum ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja di Puskesmas sehingga dalam pelaksanaannya antara Puskesmas belum terdapat keseragaman. Puskesmas dalam melaksanakan sistem keselamatan dan kesehatan kerja terbatas untuk memenuhi kriteria yang ditentukan dalam pelaksanaan akreditasi Puskesmas dan mengadopsi dari sistem pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja di Rumah Sakit. Dalam pelaksanaannya yang menjadi kendala adalah tingkat pengetahuan dan kepatuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya dalam melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja. Bentuk pengawasan yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kota Palembang dalam bentuk represif yaitu pengawasan yang dilakukan apabila telah terjadi kejadian yang tidak diinginkan dengan tujuan untuk melakukan penelusuran penyebab dan pembinaan agar kejadian tersebut tidak terulang kembali.

Kata Kunci: Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Puskesmas, Pengawasan

¹ Mahasiswa Program S2 Magister Hukum Kesehatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

THE IMPLEMENTATION OF SUPERVISION OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH FOR MEDICAL PERSONNEL IN PUSKESMAS AT PALEMBANG CITY

By:

Elisa Diana Oktarini¹, Rimawati²

Abstract

This study aims to find and analyze the implementation and supervision of occupational safety and health system for medical personnel in Puskesmas, and the need or not the formation of new legislation as the legal basis in the regulation of the implementation of occupational safety and health at the Puskesmas.

This research is an empirical normative legal research using secondary data and primary data through literature research and field research. The field research location is located in Palembang City, encompassing Puskesmas with Plenary accreditation, Puskesmas Plaju; Puskesmas Dempo; and Puskesmas Alang-alang Lebar. Primary data obtained from the subject of research, while secondary data obtained from document studies, this study was analyzed by qualitative method and presented descriptively.

The result of the research shows that normatively there is no specific regulation about the implementation of occupational health and safety in Puskesmas so that in the implementation between Puskesmas there is no uniformity. Puskesmas in implementing safety and health system to limit the criteria specified in the implementation of Puskesmas accreditation and adopted from the implementation system of occupational safety and health in the hospital. In the implementation of the constraints is the level of knowledge and compliance of medical personnel and other health personnel in implementing safety and health work. Forms of supervision provided by the Health Office of Palembang City in the form of repressive supervision is done if there has been an undesirable event with the aim to conduct a search cause and coaching so that the incident does not happen again.

Keywords: Occupational Safety and Health, Puskesmas, Supervision

¹Student of Master's Degree Program in Health Law Faculty of Law Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

² Lecturer Faculty of Law University of Gadjah Mada Yogyakarta